



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FADJAR DONNY TJAHJADI
2. Jabatan : KEPALA KANTOR
3. NHK : 114341

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.854.266.000**

1. Tanah Seluas 316 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 40.448.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/90 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 50.850.000
3. Tanah Seluas 413 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, WARISAN Rp. 14.868.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 314 m2/240 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.501.400.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 34 m2/28 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 280.700.000
6. Tanah Seluas 2735 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
7. Tanah Seluas 220 m2 di KAB / KOTA BLITAR, HASIL SENDIRI Rp. 66.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 157 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **303.300.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINI BUS Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000



2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI
Rp. 3.300.000
3. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
180.000.000
4. LAINNYA, SEPEDA GUNUNG MTB Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	430.400.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	1.052.882.273
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.884.058.697
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.524.906.970
III. HUTANG	Rp.	632.881.200
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.892.025.770

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.